

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Evaluasi terhadap kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Padang menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut relevan yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani dengan lahan di bawah dua hektar. Namun, pelaksanaan kebijakan di lapangan belum berjalan dengan efektif. Masalah yang masih sering ditemui meliputi kesulitan dalam pendataan petani penerima pupuk, ketidaksesuaian pelaksanaan teknis dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, serta keterbatasan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia yang menangani program ini. Pengukuran indikator 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat mutu) hanya aspek tepat waktu dan tepat tempat yang sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara aspek tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat mutu masih mengalami berbagai kendala. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan sudah dirancang dengan baik jika pelaksanaan di lapangan tidak optimal maka dampak yang diharapkan tidak akan tercapai.

Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan tujuan saja tetapi juga sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara nyata. Tanpa pelaksanaan yang baik, maka pengukuran efektivitas kebijakan menjadi kurang berarti dan kesejahteraan petani yang menjadi sasaran utama pun sulit terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan dan perbaikan di lapangan sangat penting untuk memastikan kebijakan pupuk bersubsidi dapat

memberikan manfaat yang sesungguhnya bagi petani kecil di Kota Padang.

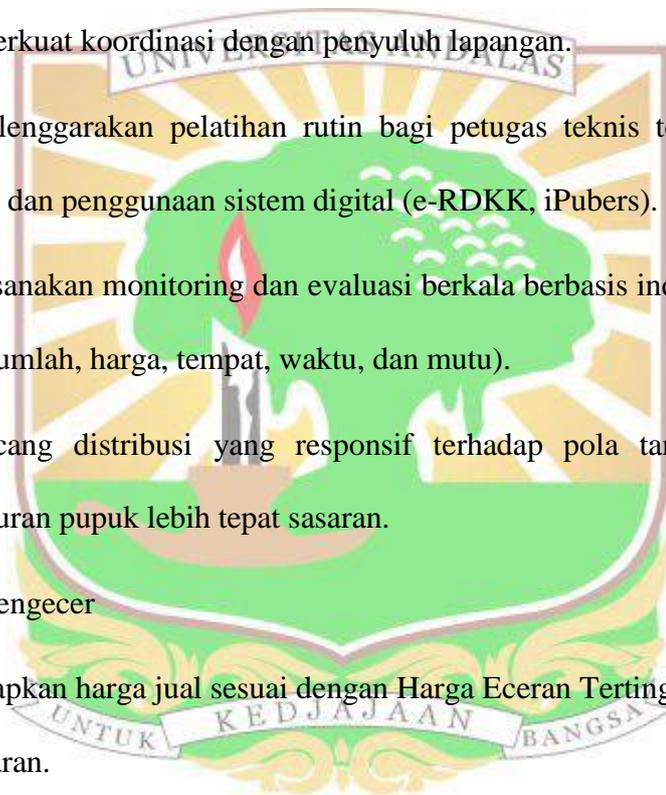
6.2 Saran

a) Dinas Pertanian Kota Padang

- Meningkatkan kapasitas sistem verifikasi dan validasi data petani secara digital agar lebih akurat dan real-time.
- Memperkuat koordinasi dengan penyuluh lapangan.
- Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi petugas teknis terkait kebijakan terbaru dan penggunaan sistem digital (e-RDCK, iPubers).
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator 6T (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu).
- Merancang distribusi yang responsif terhadap pola tanam lokal agar penyaluran pupuk lebih tepat sasaran.

b) Kios Pengecer

- Menetapkan harga jual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) secara transparan.
- Menyediakan layanan tambahan seperti pengantaran pupuk dengan biaya wajar dan informasi yang jelas.
- Memperkuat layanan pelanggan dan menyesuaikan jam operasional dengan musim tanam.
- Menyediakan dokumentasi transaksi yang rapi untuk memudahkan pengawasan dan pelaporan.

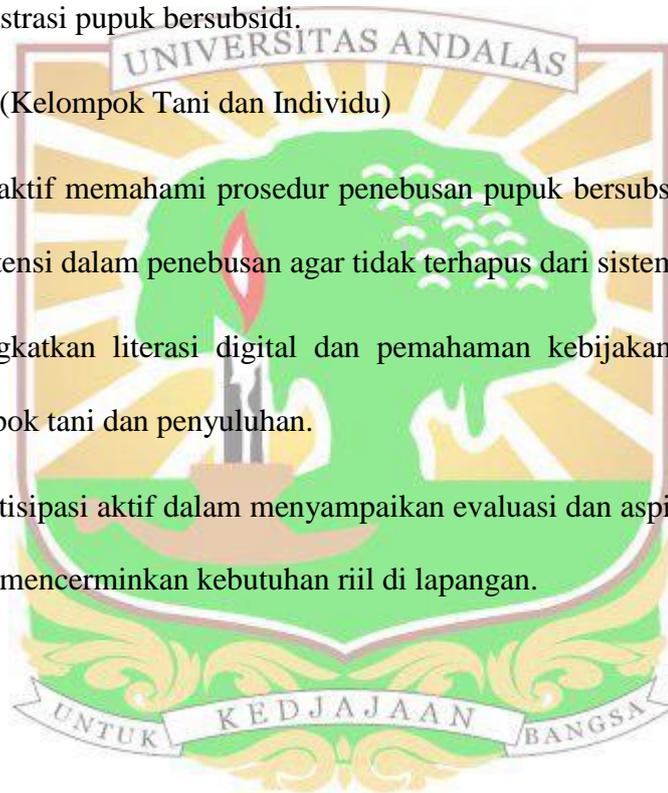


c) Distributor Pupuk

- Meningkatkan efisiensi rantai pasok dan ketepatan waktu distribusi melalui perbaikan logistik dan manajemen stok.
- Memastikan mutu pupuk tetap terjaga dari gudang hingga kios.
- Aktif berkoordinasi dengan dinas terkait.
- Memberikan pelatihan teknis kepada kios mengenai penyaluran dan administrasi pupuk bersubsidi.

d) Petani (Kelompok Tani dan Individu)

- Lebih aktif memahami prosedur penebusan pupuk bersubsidi dan menjaga konsistensi dalam penebusan agar tidak terhapus dari sistem e-RDKK.
- Meningkatkan literasi digital dan pemahaman kebijakan melalui forum kelompok tani dan penyuluhan.
- Berpartisipasi aktif dalam menyampaikan evaluasi dan aspirasi agar alokasi pupuk mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.



Rekomendasi Kebijakan:

Kebijakan pupuk bersubsidi tidak perlu dihentikan, mengingat peran strategisnya dalam menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan ekonomi petani kecil. Penghentian program berisiko menambah beban produksi dan memperbesar kesenjangan akses. Namun, kebijakan ini perlu dimodifikasi secara menyeluruh, khususnya pada aspek:

- Pendataan petani
- Distribusi dan pengawasan mutu pupuk
- Edukasi dan pemberdayaan petani.

Pendekatan kebijakan ke depan harus bersifat adaptif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara tepat guna. Dengan begitu, program subsidi pupuk tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak nyata terhadap ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.

